

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Anggoro, Seno. 2015. *Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Tegal*, (Tesis UNDIP). Semarang.
- Ardipandanto, Aryojati. 2016. *Penanganan Perda Bermasalah: Aspek Politik Dan Ketatanegaraan*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016. Jakarta.
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Perihal Undang-Undang*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- BPS Kabupaten Seram Bagian Timur. Indeks Pembangunan Manusia 2015-2017. <https://sbtkab.bps.go.id/indicator/26/57/1/indeks-pembangunan-manusia.html>. Diakses tanggal 5 November 2020.
- BPS Kabupaten Seram Bagian Timur. *Kemiskinan Timur 2015-2017*. <https://sbtkab.bps.go.id/indicator/23/69/1/kemiskinan.html>. Dikases tanggal 5 November 2020.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- Chambers, Robert. 2005. *Ideas For Development*, Earthscan. London,
- Dwipayana, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta. Institute for Research ang Empowerment (IRE) Press Abe.
- Wijaksono, Sigit. 2013. *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni.

- Ekonomi.bisnis.com. *KPPOD : 347 Perda Berpotensi Hambat Investasi*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191120/9/1172475/kppod-347-perda-berpotensi-hambat-investasi>. Diakses tanggal 12 November 2020
- Faisal, Sanapiah. 2008. *Format-format Penelitian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Farida, Maria, 2008. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta,
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Halim, Hamzah dan Kemal Renindo SP. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Konsepsi Teoritis Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. UB Press. Malang.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Iswari, Fauzi, Yohanes Alri, Mira. 2020. *Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018*. Pagarayuang law journal.
- Jdihn.go.id. *Produk Hukum Tingkat Daerah*. <https://jdihn.go.id>. Diakses tanggal 19 September 2020.
- Mardikanto, Totok. Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Merdeka.com. *Kemendagri batalkan 106 Perda di Maluku karena hambat investasi*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-batalkan-106-perda-di-maluku-karena-hambat-investasi.html>. Dikases tanggal 12 November 2020.
- Mohammad Mulyadi, 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Muhiddin, Amir. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar Vol. III No.1 April 2013.
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. Malang.2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan*

Pendekatan Berpikir Sistem. Kerjasama Lembaga Penerbitan dan dokumentasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan Bayumedia publishing. Malang.

Nugraha, Muhyar dan Latifah Ratnawaty. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Yustisi Vol. 3 No. 1.

Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung

Sihombing, Eka. 2016. *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 03.

Sirajudin dkk. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, Yappika, Jakarta

Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Penerbit Setara. Malang.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta,

Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*,. PT. Grasindo. Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tirto.id. *Mendagri Tak Lagi Berwenang Batalkan Perda Bermasalah*. <https://tirto.id/mendagri-tak-lagi-berwenang-batalkan-perda-bermasalah-cqJ4>. Diakses tanggal 3 November 2020.

Yasir, Armen. 2008. *Hukum Perundang-Undangan*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung,

Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yuliyanti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri*

Perkotaan Di Kota Solok. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas
Andalas. Padang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Peraturan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2018
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2018
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian Tim